

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, menjadi awal permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Hal itu disebabkan pada isi perundingan KMB menyatakan seluruh bekas wilayah kolonialisme Hindia Belanda diserahkan kepada Indonesia kecuali wilayah Irian Barat. Berpegang teguh pada isi perjanjian KMB, kemudian masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Namun, dalam perundingan tersebut Belanda berusaha memisahkan Irian Barat dengan alasan karena tidak adanya hubungan etnologis, sosiologis, maupun agama dengan wilayah Indonesia yang lain.

Pemerintah Indonesia kemudian mengajukan masalah Irian Barat melalui forum Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1954 setelah tiga tahun sebelumnya pembicaraan Indonesia dan Belanda mengalami kegagalan. Di dalam perundingan Sidang PBB berturut-turut, masalah Irian Barat juga tidak memberikan kepastian ke arah penyelesaian secara tuntas. Tidak tercapainya solusi Irian Barat di forum tingkat internasional karena Indonesia tidak pernah mencapai dua pertiga target suara dukungan yang diharuskan.

Menyikapi kegagalan diplomasi yang mengecewakan, Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas. Indonesia memutuskan secara sepihak hubungan Indonesia-Belanda pada tahun 1956 dan membatalkan secara keseluruhan semua persetujuan KMB. Selain tindakan-tindakan di bidang politik,

Indonesia melakukan konfrontasi di bidang ekonomi yang sangat menekan kepentingan Belanda di Indonesia yaitu dengan melakukan pemogokan total kaum buruh yang disusul dengan aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda.

Sikap Pemerintah Indonesia yang membekukan modal Belanda membuat Belanda meningkatkan kekuatan militernya. Belanda mengirim kekuatan armada lautnya berupa kapal induk *Karel Doorman*, 2 buah kapal perusak dan 2 buah kapal selam. Hubungan bilateral Indonesia-Belanda pun akhirnya bertambah buruk. Maka Pemerintah Indonesia menganggap tidak ada gunanya lagi mempertahankan hubungan diplomatik dengan Belanda. Oleh karena itu, Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda serta akan melakukan konfrontasi militer. Konfrontasi militer ini dibuktikan dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia membuktikan kekuatan Angkatan Perangnya yang bertambah dan berlipat kali ganda.

Masalah Irian Barat mulai mendapat perhatian serius di internasional terutama PBB, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Asia-Afrika. Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara Asia-Afrika dan negara sosialis. Pihak Amerika Serikat dan Australia mendukung pihak Belanda yang merupakan sekutunya. Walaupun pada akhirnya Amerika Serikat berubah arah mendukung Indonesia karena tidak mau Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis.

Pada 12 April 1961, Gabungan Kepala Staf (GKS) menyusun rencana operasi gabungan Irian Barat yang teknis penyusunannya dilakukan oleh wakil-

wakil dari Kepala Staf. Pemerintah juga membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) yang bertugas untuk perintegrasian seluruh potensi nasional dalam Pembebasan Irian Barat. Setelah terbentuknya Depertan, pada tanggal 14 Desember 1961 dibentuk juga suatu Komando Tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima KOTI ialah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan Ahmad Yani dipilih sebagai Kepala Staf Tertinggi KOTI. Dibentuk dan dipilihnya Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Operasi Pembebasan Irian Barat dan susunannya, diharapkan adanya kesatuan komando yang memungkinkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan Irian Barat dengan jalan terarah dan dapat menuju tercapainya sasaran. Presiden juga menunjuk Ahmad Yani sebagai Juru Bicara Tunggal yang tugasnya menjelaskan mengenai sengketa Irian Barat agar pemberitaan di koran-koran tidak simpang-siur.

Presiden pada tanggal 19 Desember 1961 kemudian mengumumkan komando pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang isinya secara resmi mengeluarkan suatu perintah melaksanakan konfrontasi militer dengan Belanda yang masih bersikeras menduduki wilayah Irian Barat. Maka ABRI disiapkan-siagakan untuk pada diperintahkan melaksanakan pembebasan Irian Barat dengan kekuatan fisik militer penuh.

Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Pembebasan Irian Barat, Ahmad Yani memperlihatkan kecakapan serta kematangan pikirannya dalam tindakan politik maupun militer. Sebagai tindak lanjut Trikora, Ahmad Yani

sebagai Kepala Staf KOTI mempunyai ide misi pembelian senjata yang dilaksanakan pada bulan Desember 1960 dan dilanjutkan pada tahun 1961 ke negara-negara Eropa Timur. Hasil Misi Yani tersebut menghasilkan kesepakatan pembelian senjata-senjata militer untuk memperkuat angkatan perang Indonesia yang diperlukan dalam rangka pembebasan Irian Barat

Di samping menjajaki pembelian dan perlengkapan militer ke negara-negara Eropa Timur, Ahmad Yani juga berperan memimpin Operasi Khusus yang bersifat rahasia. Ia mengirim seorang perwira untuk melakukan peninjauan ke Irian Barat dengan tugas khusus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai Irian Barat. Setelah perwira tersebut mengumpulkan Informasi, semua pengalaman yang diperoleh selama menjalankan misi rahasia dilaporkan kepada Ahmad Yani. Panglima Besar Pembebasan Irian Barat dalam melakukan pekerjaan mengenai pembebasan Irian Barat dibantu oleh Ahmad Yani yang memberikan saran militer, merumuskan dan melaksanakan perintah-perintah Panglima Besar. Presiden mendesak Ahmad Yani agar operasi infiltrasi dilaksanakan secepatnya dan memusatkan diri secara khusus pada persiapan latihan sukarelawan dari pasukan-pasukan terpilih TNI dengan memperhatikan pembentukan satuan-satuan para komando.

Sebagai Kepala Staf KOTI Ahmad Yani sering memimpin rapat-rapat gabungan bersama GKS dan Komado Mandala di Istana untuk mengkaji pelaksanaan infiltrasi. Ia melancarkan beberapa gelombang untuk mendaratkan pasukan-pasukan-pasukan TNI di Irian Barat, operasi ini untuk mendukung penyusupan yang dilakukan oleh para gerilyawan-gerilyawan. Operasi Naga

adalah satu operasi infiltrasi atas permintaan khusus Ahmad Yani dengan terbuka menilai bahwa belum adanya kesatuan tempur yang kuat, sehingga ia memerintahkan diterjunkannya sebuah pasukan dengan jumlah pasukan yang besar.

Situasi antara Indonesia dan Belanda yang semakin tegang, menimbulkan keprihatinan dari Amerika Serikat. Kemudian atas desakan Amerika Serikat, PBB dan negara lainnya, Indonesia dan Belanda sepakat untuk berunding lagi di bawah pengawasan PBB. Persetujuan itu tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus yang menghasilkan suatu badan sementara yang diberi nama *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Tugas pokok dari pemerintahan sementara ini adalah penyerahan pemerintahan atas Irian Barat dari pihak Belanda dan kemudian hari menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia. Ahmad Yani beserta rombongan pemerintah dan Angkatan Bersenjata RI menjadi wakil Pemerintah Indonesia mengadiri upacara penyerahan itu.¹

¹ Lihat lampiran gambar, hlm. 102